2018

HASIL PENELITIAN PERKAWINAN USIA ANAK DI NIAS

Tim Peneliti:

Otoriteit Dachi (Ketua)
Dorkas Orienti Daeli (Anggota)
Gustav Gabriel Harefa (Anggota)
Delipiter Lase (Anggota)

LEMBAGA PENELITIAN STT BNKP SUNDERMANN

Jl. Pendidikan No. 19 Gunungsitoli – Nias
Provinsi Sumatera Utara
2018

PERKAWINAN ANAK DI NIAS

ABSTRAK

Perkawinan adalah media atau sarana dalam membentuk sebuah keluarga. Umumnya, perkawinan dianggap sah ketika memenuhi norma hukum (pemerintah), agama dan sosial (adat setempat). Meskipun pasangan suami istri telah mengikat janji dan dalam perkawinan, namun tidak jarang menimbulkan persoalan baru. Salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang dilaksanakan pada umur yang masih muda atau disebut dengan perkawinan anak. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana praktik perkawinan usia anak yang terjadi di Nias khususnya di Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, faktor penyebab dan dampak serta upaya penyadaran dan pencegahan guna meminimalisasi dampak perkawinan usia anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data ibu-ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, agama dan pejabat pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2012 – 2018, dari 90 orang perempuan berusia 15-40 tahun, sebanyak 33 orang (36,67%) menikah pertama kali pada umur 15-19 tahun. Perkawinan usia anak secara umum dan juga konteks wilayah setempat disebabkan oleh pergaulan bebas (seks pra-nikah) sebagai akibat negatif dari perkembangan teknologi dan informasi, pendidikan yang rendah termasuk pengetahuan tentang ajaran agama, tradisi/adat perkawinan (jujuran mahal), orientasi keturunan, kemiskinan, *lakhomi* (harga diri), dan kawin paksa. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan psikologi. Dari berbagai faktor dominan mengapa terjadi perkawinan anak direkomendasikan untuk memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi yang komprehensif sejak dini di sekolah dan meninjau ulang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, peningkatan peran pendidikan keluarga, lembaga keagamaan dan adat/budaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas penyertaannya kepada kita semua utamanya kepada Tim Peneliti STT BNKP Sundermann sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penelitian ini bertema Perkawinan Usia Anak di Nias, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang praktik perkawinan usia anak di lokasi penelitian, faktor penyebab dan dampak serta rekomendasi yang dapat diberikan guna mengatasi atau meminimalisasi terjadinya perkawinan usia anak. Penelitian dilaksanakan di wilayah Nias Utara khususnya Kecamatan Sitolu Ori dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam. Penelitian berlangsung sejak minggu akhir September sampai dengan bulan November 2018.

Selama proses penelitian berlangsung Tim melibatkan beberapa mahasiswa sebagai enumerator yang bertugas untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan angka perkawinan usia anak. Kemudian, melalui FGD dan wawancara mendalam Tim berupaya untuk memperoleh informasi atau data tentang faktor penyebab serta dampak yang timbul.

Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penelitian ini berhasil dirampungkan, karena itu pada kesempatan ini Tim Peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan RI sebagai sumber dana hibah Penelitian. Pimpinan STT BNKP Sundermann yang telah memberikan kepercayaan kepada beberapa dosen sebagai Tim Peneliti, dan juga kepada para narasumber di lokasi penelitian, serta pemerintah daerah setempat.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pengambil keputusan/kebijakan dalam rangka mencegah dan mengatasi perkawinan usia anak. Sekaligus dapat menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya.

Gunungsitoli, Desember 2018

Tim Peneliti

A. Pendahuluan

Perkawinan¹ adalah media atau sarana dalam membentuk sebuah keluarga. Umumnya, perkawinan dianggap sah ketika memenuhi norma hukum (pemerintah), agama dan sosial (adat setempat). Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Realita yang terjadi, meskipun pasangan suami istri telah mengikat janji dalam perkawinan, namun masih banyak masalah dalam keluarga. Konflik internal antara suami istri, perselingkuhan, KDRT, berujung kepada perceraian terjadi dalam keluarga. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya masalah ekonomi, perbedaan prinsip antara suami dan istri, hubungan yang kurang harmonis dengan mertua, dan oleh karena perkawinan usia anak.

Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pasal 7 dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Sementara Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Namun pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat dilangsungkan. Tidaklah mengherankan jika sering dijumpai banyak anak perempuan dinikahkan pada usia di bawah 16 tahun.

Berdasarkan hasil *Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013* yang mencakup sampel 300.000 rumah tangga, mencatat 2,6 persen perempuan menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun. Selain itu 23, 9 persen menikah pada umur 15-19 tahun. Di tempat lain, dari data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas

¹ Di sebagian tempat dan sumber, digunakan istilah pernikahan dini. Dalam penelitian ini, kadang kala digunakan istilah “pernikahan dini” yang peneliti anggap sama dengan istilah Perkawinan Usia Anak.

Universitas Indonesia, terungkap angka pernikahan dini di Indonesia adalah peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 persen perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah.² Demikian halnya hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013-2015, perkawinan anak dengan persentase di atas 10 % dari perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya di bawah 18 tahun menurut provinsi, masih tersebar di 21 Propinsi (61 %) dari 34 Propinsi di Indonesia. Sementara Susenas terakhir menunjukkan bahwa perkawinan anak di atas 10 % sudah merata di seluruh propinsi di Indonesia dengan Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat tertinggi dari Perkawinan anak (39, 53 %), dengan Provinsi DI Yogyakarta peringkat terakhir (11, 07 %). Provinsi Sumatera Utara, tingkat perkawinan anak berada di angka 16,99 %³. Dengan demikian berdasarkan data-data ini menunjukkan dari 5 perkawinan, terjadi 1 (satu) kasus perkawinan anak. Secara nasional, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 25,71 % (Tabel 1).

Berdasarkan data penelitian dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Nias, tahun 2008 yang lalu terhadap 160 orang perempuan remaja/pemuda dari berbagai daerah di Kepulauan Nias, terungkap bahwa perempuan yang menikah pada usia 13 tahun (0,5%), 14 tahun (0,9%), 15 tahun (5,5%), 16 tahun (4,1%), dan 17 tahun (3,7%).⁴ Bila diteliti lebih lanjut, sebenarnya kasus pernikahan dini banyak terjadi di Nias. Sayangnya, menurut PKPA data yang ingin diperoleh tidak lengkap karena adanya rekayasa dalam akta nikah.⁵ Dari hasil penelitian PKPA terungkap beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Nias dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain: usia dianggap sudah cukup matang menurut kebiasaan masyarakat setempat, tanda-tanda “kewanitaan” bagi anak perempuan sudah tampak, untuk mengurangi beban keluarga (faktor ekonomi), untuk mengikat tali persaudaraan atau rumpun keluarga, sudah hamil karena hubungan diluar nikah (kehamilan tak diinginkan) dan terjadinya pemalsuan usia perempuan oleh keluarga dan disahkan oleh pejabat berwenang ditingkat desa dan kecamatan.⁶

² “Pernikahan Dini Memicu Masalah” dalam *Harian Kompas*, 20 Juni 2015, hlm. 1.

³ Lihat BPS, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*, (Jakarta: BPS, 2017).

⁴ Lubis (Direktur Eksekutif PKPA), *Penelitian Kekerasan Terhadap Anak Perempuan dan Pernikahan Dini di Pulau Nias* (Nias: PKPA, 2008), hlm. 14.

⁵ PKPA, *Perempuan Nias Merajut Mimpi*, (Medan: PKPA, 2008), hlm. 40.

⁶ *Ibid*, hlm. 40.

Sementara itu berdasarkan data Survey Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara kasus perkawinan anak tertinggi justru terjadi di Kepulauan Nias, yaitu di wilayah Kabupaten Nias Utara dengan yang tertinggi di Kecamatan Sitolu Ori (51 %) dan nomor dua adalah di Kecamatan Alasa Talumuzoi (50 %)⁷. Data ini berdasarkan umur perempuan 20-24 tahun yang telah menikah dengan umur menikah pada umur 16 tahun ke bawah.

Tabel 1
Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Pernah Kawin yang Umur
Perkawinan Pertamanya di Bawah 18 Tahun Menurut Provinsi
(BPS Tahun 2017)

⁷ BPS, *Kemajuan yang Tertunda Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus 2012* (Jakarta: Kerjasama BPS dan Unicef), hlm. 60

Maraknya perkawinan dini telah membawa dampak buruk dalam kehidupan keluarga. Dari segi kesehatan berdampak buruk kepada kesehatan ibu karena alat reproduksi belum matang yang tentu saja membahayakan anak ketika lahir dalam sebuah keluarga. Dari segi psikologis, orang yang menikah pada usia dini, seringkali masih bersifat kenak-kanakan (masih belum dewasa dalam berpikir), bersifat emosional, tidak bisa mandiri (masih bergantung kepada orangtua). Dari segi ekonomi, mereka masih dalam tahap tanggungan orangtua, belum bisa mandiri. Ketidakmandirian ini menyebabkan terjadi pertengkaran disertai kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu dari segi sosial mereka masih belum memiliki peranan penting untuk berbicara dalam perkumpulan-perkumpulan ditengah-tengah masyarakat. Karena mereka masih dianggap belum sepenuhnya punya pengalaman besar untuk berperan aktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam masyarakat itu sendiri.

Uraian di atas menunjukkan bahwa umur ikut menentukan keberlangsungan sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Dengan semakin maraknya perkawinan dini, maka sudah sepatutnya semua pihak (keluarga, agama, pemerintah dan lembaga pendidikan) berkewajiban melakukan memberikan penyadaran anggota masyarakat untuk mencegah sekaligus meminimalisasi terjadinya perkawinan usia anak.

Bertolak dari latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah praktik atau kasus perkawinan usia anak, penyebab dan dampak serta hal-hal yang dapat direkomendasi guna mencegah atau mengatasi maraknya perkawinan usia anak. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk untuk memperoleh gambaran praktik perkawinan usia anak yang terjadi di wilayah Nias khususnya di Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara, faktor penyebab dan mengidentifikasi dampak, serta memberi rekomendasi kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan, penyadaran dan minimalisasi praktik perkawinan usia anak.

B. Kerangka Teori dan Konsep

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah bersatunya dalam ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁸

Dalam konteks budaya Nias, perkawinan adalah hal yang penting dalam keseluruhan kehidupan setiap anggota masyarakat. Jikalau di daerah Toraja, kematian merupakan “acara dengan pesta besar”, maka di Nias perkawinan yang mengambil tempat dengan “proses acara yang lama dan menguras tenaga, pikiran termasuk ekonomi.”⁹ Bahkan bagi masyarakat Nias perkawinan adalah salah satu jalan mendapatkan *lakhomi* (kemuliaan) dan mendapatkan status di tengah masyarakat. Perkawinan juga dilihat sebagai suatu peristiwa yang ditempuh untuk meneruskan kehidupan. Menurut tradisi bahwa sumber kehidupan itu berada di pihak perempuan. Sehingga ada prinsip mengawini perempuan sering disebut dengan *mangai tanomo niha* (mengambil benih manusia)¹⁰ Sehingga ada sebagian pemahaman bahwa “semakin muda benih yang diambil” atau mengawini perempuan muda, semakin lebih baik dalam memberi pertumbuhan. Pemahaman ini misalnya, tergambar dalam salah satu syair maena (tarian khas Nias) yang sering dinyanyikan pada pesta pernikahan di seluruh wilayah kepulauan Nias, berbunyi: “.... *no awuyu wuyu no ohöwahöwa, bohoutama sekolah PGA ...* (terjemahan bebas ‘dia (perempuan) masih muda dan berisi, karena baru tamat sekolah PGA (pendidikan guru Agama) – setingkat SLTA’¹¹

Perkawinan bukanlah suatu hal yang dilakukan tanpa aturan. Perkawinan membutuhkan pengakuan. Sebuah perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan dengan paksa, melainkan harus dengan kesepakatan bersama. Hal ini dicatat dalam UU, bahwa perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹³ UU juga menegaskan, bahwa

⁸ UU Perkawinan No.1/1974, Bab I, Pasal 1.

⁹ W. Gulo, *Injil dan Budaya Nias* (Gunungsitoli, 2004), hlm. 102.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

¹¹ Terjemahan bebas “gadis (pengantin perempuan) yang masih muda belia, baru lulus sekolah pendidikan guru agama” (sekitar 15-17 tahun).

¹² UU Perkawinan No. 1/1974, BAB I, Pasal 2.

¹³ UU Perkawinan, No.1/1974, Bab II, Pasal 6.

suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁴

Selain dari hal tersebut di atas, salah satu persyaratan penting dalam melangsungkan perkawinan adalah umur. Batasan umur pernikahan yang dimaksud adalah berdasar kepada UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, pada pasal 7 ayat 1 tertulis bahwa pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Perkawinan yang tidak sesuai dengan umur di atas disebut dengan perkawinan usia anak atau pernikahan dini.

Secara sederhana perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang manusia yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) yang tidak sesuai dengan batasan umur yang telah ditetapkan.¹⁵ Yuwenus Wenda dalam bukunya *Pernikahan Dini* mengutarakan bahwa pernikahan dini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak muda yaitu menikah pada usia dini. Atau bisa dikatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah batasan umur yang telah ditetapkan.¹⁶

Pertanyaan sekarang adalah mengapa masih terjadi yang namanya perkawinan usia anak? Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia anak? Sekalipun perkawinan usia anak banyak membawa dampak yang kurang baik kepada keluarga yang bersangkutan akan tetapi perkawinan usia anak masih saja terjadi. Berbagai upaya yang telah dilakukan, tetapi hal itu masih saja dilakukan.

Dalam buku *Perempuan Nias Merajut Mimpi* yang diterbitkan oleh PKPA mengatakan bahwa seorang anak perempuan akan dikawinkan karena beberapa faktor antara lain:¹⁷

1. Usia dianggap sudah cukup matang menurut kebiasaan masyarakat setempat
2. Tanda-tanda “kewanitaan” bagi anak perempuan sudah tampak
3. Untuk mengurangi beban keluarga (faktor ekonomi)
4. Untuk mengikat tali persaudaraan atau rumpun keluarga
5. Sudah hamil karena hubungan diluar nikah (kehamilan tak diinginkan)

¹⁴ UU Perkawinan, No.1/1974, Bab VI, Pasal 33.

¹⁵ Erlina Pardede, *Buku Kecil Tentang HIV/AIDS, KDRT, Perkosaan, Pernikahan Dini dan Trafficking*, (Pematangsiantar: KN LWF, 2017), hlm. 16

¹⁶ Yuwenus Wenda, *Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012), hlm. 20-22.

¹⁷ PKPA, *Perempuan NIAS Merajut Mimpi*, (Medan: PKPA, 2008), hlm. 40.

6. Terjadinya pemalsuan usia perempuan oleh keluarga dan disahkan oleh pejabat berwenang ditingkat desa dan kecamatan.

Selain itu Yowenus Wenda dalam bukunya *Pernikahan Dini*, mengungkapkan beberapa alasan mengapa seseorang melakukan perkawinan usia anak yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Pengaruh sosial
- b. Adanya fasilitator
- c. Ada sesuatu yang hendak dicapai/motif ekonomi
- d. Dan tidak dapat menahan diri

Perkawinan usia anak juga dilatarbelakangi oleh pemahaman orangtua tentang perkawinan masih kurang diminimalisir dengan baik. Karena biasanya orangtua mengawinkan anak-anaknya ketika melihat secara fisik sudah dewasa dan orangtua tidak banyak memikirkan hal-hal lain seperti pendidikan, segi umur dan kesehatan. Ini disebabkan karena faktor pengetahuan orangtua yang sangat rendah atau terbatas. Pengetahuan pengalaman serta wawasan orangtua yang terbatas juga salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan usia anak.

Selain itu faktor paksaan dari orangtua juga menjadi alasan terjadinya perkawinan usia anak, disebabkan oleh adat istiadat dari budaya suku tertentu, ekonomi (kemiskinan/balas budi pengangguran berkepanjangan) dan hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas, termasuk pengaruh penggunaan media sosial yang tidak terkendali.¹⁹

Dampak dari perkawinan usia anak yaitu dari segi kesehatan dengan beresiko kepada tingginya angka kematian ibu dan anak ketika melahirkan. Dari segi sosio ekonomi menyebabkan ketidakmampuan dalam membiayai hidup keluarga (ketidakmandirian). Dari segi psikologis, usia anak masih belum matang secara mental dan juga dalam berpikir, sehingga mudah mengambil keputusan yang salah, terjadinya KDRT berujung kepada perceraian.²⁰

Berdasarkan hasil Susenas 2008-2012 kerjasama BPS dan Unicef, lima rekomendasi untuk membantu memastikan bahwa stagnasi dalam penurunan prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia dapat dipercepat kembali, yaitu 1)

¹⁸ Yowenus Wenda, *Op, Cit*, hlm. 32-34.

¹⁹ Lihat KN LWF, hlm. 16.

²⁰ Lihat Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: BPK-GM, 2007)

meningkatkan intervensi untuk perlindungan anak perempuan usia 15-17 tahun, dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah; 2) menangani norma sosial dan budaya yang menerima atau melestarikan praktik tersebut dengan orang tua, guru, keluarga besar, dan tokoh agama; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; 4) menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak perkawinan usia anak paling tinggi dan 5) mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia²¹.

C. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam. Diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam dilakukan agar peneliti dapat memahami lebih dalam sudut pandang informan penelitian serta konteks sosial budaya di lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara.

Untuk pengumpulan data kualitatif yang digunakan adalah diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara mendalam dilakukan terhadap remaja yang melakukan perkawinan muda, para orang tua, tokoh agama/masyarakat, pemerintah daerah, organisasi sosial masyarakat, kepala desa/sekolah/guru, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan petugas kesehatan/dinas kesehatan setempat. Jumlah peserta diskusi kelompok terfokus cukup banyak, namun akhirnya dibatasi menjadi 15-20 orang dengan waktu diskusi 120 menit.

Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk memperoleh data tentang kasus/praktik perkawinan usia anak serta menggali informasi terkait dengan penyebab dari adanya perkawinan anak, dampak yang ditimbulkan serta upaya atau strategi yang perlu ditempuh guna mengatasi persoalan berdasarkan konteks sosial budaya masyarakat setempat.

²¹ BPS, *Kemajuan yang Tertunda Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus 2012* (Jakarta: Kerjasama BPS dan Unicef), hlm. 4.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus, ditemukan bahwa kasus atau praktik perkawinan usia anak di lokasi penelitian masih berlangsung hingga saat ini. Mengingat sulitnya memperoleh informasi atau data, peneliti pada akhirnya fokus pada salah satu wilayah Kabupaten Nias Utara yakni Kecamatan Sitolu Ori.

Wilayah Sitolu Ori merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Nias Utara. Terdiri dari 6 Desa dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 12.124 jiwa (BPS 2017). Penelitian berlangsung selama bulan Oktober 2018. Selama penelitian berlangsung peneliti kesulitan memperoleh informasi dan data, hal ini disebabkan oleh pertama, *lakhömi* (harga diri) - keluarga dan pelaku enggan melaporkan perkawinan dini yang dilakukan kepada pihak pemerintah setempat termasuk ke Dinas Kependudukan. Kedua, pelaku meninggalkan daerah asal sehingga sulit melacak keberadaanya, dan ketiga, Pemerintah setempat tidak memiliki data akurat tentang perkawinan usia anak.

Kasus/Praktik Perkawinan Usia Anak di Nias Utara

Kurun waktu tahun 2012 – 2018, dari 90 orang perempuan berusia 15-40 tahun, 33 orang (36,67%) di antaranya menikah pertama kali pada umur 15-19 tahun. Angka ini lebih kecil (menurun) jika dibandingkan dengan temuan penelitian Survey Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Utara kasus perkawinan anak tertinggi terjadi di Kepulauan Nias, yaitu di wilayah di Kecamatan Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara yakni 51 %.

Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tertinggi perkawinan usia anak di daerah penelitian adalah seks pra-nikah mencapai 45%, kemudian disusul oleh kemiskinan dan pendidikan yang rendah serta kawin paksa/perjodohan.

1. Seks Pra-Nikah (pergaulan bebas).

Penyebab paling utama perkawinan usia anak adalah seks pra-nikah (pergaulan bebas/kenakalan remaja). Meningkatnya pergaulan bebas dan kenakalan di

kalangan remaja akhir-akhir ini adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan *internet* dan akses terhadap konten-konten vulgar atau pornografi oleh anak-anak atau remaja meningkat drastis dan tidak terkontrol oleh keluarga dan lembaga pendidikan. Hal ini mendorong orangtua dan pihak keluarga menikahkan anak atau anggota keluarganya lebih awal meskipun usia belum cukup.

2. Kemiskinan (Ekonomi) dan Pendidikan yang Rendah.

Penyebab yang juga dominan adalah kemiskinan secara ekonomi. Kemiskinan ini menyebabkan anak-anak/remaja dalam keluarga tidak bersekolah. Mereka hanya tinggal di rumah dan ke kebun. Mereka umumnya tidak memiliki aktifitas rutin sehingga mendorong mereka untuk mencari pasangan. Hubungan anak/remaja terhadap lawan jenis sulit terkontrol oleh orangtua yang berakibat terjerumusnya anak pada hubungan seks pra atau di luar nikah, dan tidak jarang berakhir dengan kawin lari dan terpaksa keluar dari keluarga dan lingkungannya karena malu dan dikucilkan.

Rendahnya pendidikan orangtua dan anak-anak dalam keluarga karena alasan ekonomi (kemiskinan) juga menjadi penyebab maraknya praktik perkawinan usia anak. Orangtua atau keluarga memiliki pemahaman yang minim terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta dampak yang timbul pasca perkawinan usia anak. Para remaja di lokasi penelitian memiliki pemahaman yang rendah terhadap persoalan kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja.

3. Tradisi/Adat (budaya)

- *Böwö* (Jujuran)

Nias sangat terkenal dengan *Böwö* (jujukan = mahar kawin) yang nilai ekonominya sangat besar dalam tradisi perkawinan. Hal ini juga menjadi alasan keluarga/orangtua menikahkan anaknya pada usia dini guna menghindari *Böwö* yang sangat besar.

- *Lakhomi* (Kemuliaan/Harga diri)

Lakhomi (Kemuliaan/Harga diri) juga menjadi salah satu penyebab maraknya praktik perkawinan usia anak. Paradigma orangtua yang menikahkan anak laki-lakinya lebih awal menunjukkan wibawa, harga diri serta kemampuan secara

ekonomi (terpandang). Dan, merasa harga diri terinjak (atau malu) manakala anaknya laki-laki belum menikah pada usia tertentu.

- *Atua Barö*

Dalam konteks budaya Nias, bahwa pernikahan itu sangat diagungkan oleh setiap orang sehingga jikalau seseorang itu tidak menikah pada masa muda, maka dapat dikatakan “*atua barö*” (istilah bagi perempuan yang belum menikah di atas umur 20 tahun).²² Dalam Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nias (Rostina, 1985) dijelaskan bahwa umur mulai kawin dalam budaya masyarakat Nias adalah laki-laki sekitar 15-16 tahun, sementara perempuan sekitar 12-13 tahun.²³

- Orientasi Keturunan

Faktor orientasi keturunan, berkaitan dengan tradisi yang berakar dalam diri orangtua bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Prinsip “banyak anak banyak berkat/rejeki” menyebabkan orangtua rela menikahkan anaknya pada usia anak.

4. Tanggung Jawab Orangtua terhadap Anak

Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari keluarga juga turut berandil terjadinya perkawinan usia anak. Hal ini berkaitan ketika oknum orangtua tidak membekali anaknya dengan pendidikan karakter termasuk pendidikan seks yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Akhirnya ketika anaknya menginjak remaja (masa puber), tidak dapat mengendalikan diri sehingga terjebak dalam pergaulan bebas (faktor pertama). Keteladan dari orangtua juga ikut memicu terjadinya praktik perkawinan usia anak. Terlebih ketika dalam keluarga terjadi diskriminasi gender dan konflik internal, menyebabkan anak mereka “melampiaskan” kekecewaan, kekesalan dengan menikah usia muda.

5. Ketiadaan sanksi hukum/pidana yang jelas atas penyimpangan atau pelanggaran UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun,

²² Harefa, *Hikayat dan Cerita Bangsa serta Adat Nias*, (Tapanuli: Rapat Fonds Residentie, 1939), hlm. 27-37.

²³ Rosthina Laoli dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan di Daerah Nias* (Departemen P&K Prov. Sumatera Utara, 1985), hlm. 46-47.

termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat dilangsungkan.

6. Pengabaian terhadap nilai-nilai yang berasal dari ajaran keagamaan. Internalisasi ajaran agama ternyata belum sepenuhnya dapat menjadi landasan atau standar dalam bersikap atau berperilaku pada sebagian masyarakat tertentu.
7. Kawin Paksa atau Dijodohkan.

C. Dampak Perkawinan Usia Anak

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi dan interviu kepada beberapa responden (informan) dan juga para pelaku diperoleh informasi dan fakta bahwa perkawinan usia anak berdampak pada berbagai aspek antara lain:

1. Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan usia anak dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Rangkaian persoalan baru pasca perkawinan usia anak ini berpotensi memicu perselingkuhan dan perceraian diam-diam (pisah ranjang)²⁴.

Perkawinan usia anak karena faktor hamil di luar nikah, pada umumnya kurang diterima oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga tak jarang harus pindah dan keluar dari lingkungannya. Sikap diskriminatif keluarga dan lingkungan sosial, juga kerap dihadapi oleh pasangan nikah usia anak, mereka jarang diberi peran sosial dalam berbagai aktivitas atau kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena dianggap belum punya pemahaman pengalaman yang baik menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Ditemukan juga kasus bunuh diri dari beberapa pasangan nikah usia anak sebagai akibat dari keputusan, depresi/stress karena faktor keuangan dan masalah-masalah interpersonal.

²⁴ Kasus perceraian di Nias, masih sangat minim bahkan jarang terjadi. Hal ini dikarenakan oleh faktor agama dan adat/budaya.

2. Segi Kesehatan

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan usia anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Salah satu dampak signifikan dari pernikahan anak adalah ibu muda tidak tahu atau tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah (BBR), hal ini berpotensi meninggal setelah dilahirkan.

3. Segi Pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, akan membawa dampak putus sekolah. Keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan menjadi sulit dicapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki mulai mengendur karena banyaknya tanggung jawab yang harus diemban setelah menikah. Di sisi lain, seseorang yang berpendidikan rendah berakibat pada sulitnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berupah tinggi kecuali bekerja sebagai buruh.

4. Dampak Ekonomi

Perkawinan usia anak seringkali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Khususnya di kalangan anak berkategori remaja, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara berulang dan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.

5. Dampak Psikologi

Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Di beberapa tempat ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan tidak diinginkan dan mengalami kekerasan rumah tangga. Remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Perkawinan usia anak hadir dan nyata di sekitar kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Secara nasional, Indonesia sedang ‘Darurat Perkawinan Usia Anak’. Khususnya di Nias perkawinan usia anak telah menyebabkan terjadinya disharmoni dalam kehidupan keluarga yang berkelanjutan.

Peran semua elemen sangat diperlukan dalam mencegah sekaligus meminimalisasi praktik perkawinan usia anak. Pendampingan kepada pelaku dan korban juga sangat dibutuhkan sehingga dampak lanjut seperti KDRT, kesehatan sampai kepada perceraian dapat dicegah.

Berdasarkan realita dan dampak terhadap perkawinan usia anak di Nias Utara tersebut, beberapa langkah atau strategi dalam rangka penyadaran dalam pencegahannya, yaitu:

Pertama, secara bersama-sama mensosialisasikan Undang-undang perkawinan anak di Indonesia, baik di tengah masyarakat, lingkungan adat dan keagamaan serta sekolah.

Kedua, sosialisasi dampak dari perkawinan dini secara langsung dalam komunitas siswa/i; wadah remaja (seperti karang taruna) dan komisi pelayanan Remaja/Pemuda di lingkungan keagamaan. Penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk

remaja. Pendidikan Agama di sekolah perlu diberikan salah satu materi tentang perkawinan usia anak.

Ketiga, memprioritaskan para keluarga dalam hal ini orangtua agar memiliki pola pikir, sikap, dan trampil menolak praktik perkawinan usia anak. Sekaligus memberikan perhatian dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan anak. Orangtua juga perlu meningkatkan pendampingan terhadap anak yang menginjak usia remaja tentang penggunaan alat elektronik komunikasi serta menguatkan iman melalui ibadah keluarga.

Keempat, Peran tokoh adat sangat diharapkan khususnya dalam meninjau ulang kembali nilai material jujur di Nias yang juga menjadi salah satu factor penyebab terjadinya perkawinan usia anak.

Dari upaya atau strategi di atas, rencana aksi yang dapat dilaksanakan dalam mencegah perkawinan usia anak tersebut di mana semua pihak (keluarga, pemimin agama, pendidik, tokoh adat, pemerintah, dan LSM, dll) bisa menjadi subyek dalam melakukan pencegahan. Di samping pemerintah setempat sebagai *leading sector*, instansi keagamaan melalui peraturan-peraturannya untuk diperketat dalam memberi peluang perkawinan usia anak tersebut.

Sebagai obyeknya adalah masyarakat yang belum terkontaminasi masalah pergaulan bebas dan para orangtuanya. Fokus perhatian adalah pelajar SMP dan SLTA oleh karena itu perlu pendekatan yang komprehensif dalam menangani sasaran ini. Di samping pelajar SMP dan SLTA yang juga menjadi sasaran prioritas dalam usaha memproteksi individu dan keluarga adalah lingkungan sekolah. Metode untuk membekali masyarakat, khususnya para siswa/pelajar SMP dan SLTA, agar memiliki pola pikir, sikap, serta trampil menolak praktik perkawinan usia anak adalah memberikan pendidikan melalui informasi tentang data penyebab dan dampak yang diakibatkan praktik perkawinan usia anak terutama kepada pelaku praktik perkawinan usia anak, serta meyakinkan generasi yang buruk yang dihasilkan akibat praktik perkawinan usia anak tersebut.

Strategi pencegahan yang bagus dan jelas namun apabila tidak diketahui oleh seluruh seluruh subyek pencegahan maka yang akan terjadi hanya gerakan persial dari subyek subyek pelaku pencegahan. Oleh karena itu diperlukan alignment semua elemen terpinpin dalam satu visi, saling melengkapi dalam satu jajaran. Ini yang harus

diperjuangkan agar terjadi gerakan rakyat secara masif untuk mencegah perkawinan usia anak.

Lembaga atau instansi terkait yang diberi tugas untuk mencegah perkawinan usia anak perlu membuka diri, menyediakan tenaga dan anggarannya untuk dapat mengungkit atau mendorong kelompok masyarakat maupun individu untuk menjadi pelaku pencegahan. Untuk menguji sekaligus merealisasi alignment dalam mencegah praktik perkawinan usia anak diperlukan momentum berupa gerakan masyarakat secara komprehensif melibatkan seluruh komponen masyarakat, instansi terkait pusat maupun daerah. Tentu saja ada yang mengkomandoi, misalnya Komisi nasional HAM Anak sebagai *leading sector* dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Langkah berikutnya adalah mendorong media agar menggerakkan emosi masyarakat secara continue agar gerakan masyarakat dalam upaya mencegah praktik perkawinan usia anak bergerak dan menggema. Untuk merealisasi tentu diperlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang dicantumkan dalam institusi terkait dan juga para pemerhati yang konsen terhadap perjuangan hak anak yang mengawal atau mengawasi termasuk kesediaan untuk mau berkeringat dan semangat memperjuangkan program dan merealisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, Earl (1998). *The Practice of Social Research*. California: Wadsworth Publishing Company, hal. 194-196
- Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus 2012* (Jakarta: Kerjasama BPS dan Unicef).
- Badan Pusat Statistik, *Perkawinan Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*, (Jakarta: BPS, 2017)
- Bernard, H. Russell (1995). *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. Walnut Creek: AltaMira Press, hal. 165
- Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI, edisi IV*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Girsang, Rio F., *Nias Dalam Perspektif Gender* (Gunungsitoli: Caritas Keuskupan Sibolga, 2014).
- Gulo, W., *Injil dan Budaya Nias* (Gunungsitoli, 2004), hlm. 102.
- Gunarsa, Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: BPK-GM, 2007)
- Harefa, F., *Hikayat dan Cerita Bangsa Serta Adat Nias*, (Tapanuli: Rapat Fonds Residentie, 1939).
- Laoli, Rosthina Laoli dkk, *Adat dan Upacara Perkawinan di Daerah Nias* (Departemen P&K Prov. Sumatera Utara, 1985).
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G. Guba (1985). *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publication Inc. hal. 199.
- Lubis (Direktur Eksekutif PKPA), *Penelitian Kekerasan Terhadap Anak Perempuan dan Pernikahan Dini di Pulau Nias* (Nias: PKPA, 2008).
- Mahkamah Konstitusi, Tolak Uji Materi Batas Usia Perkawinan bagi Perempuan” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2254845/mk-tolak-uji-materi-batas-usia-perkawinan-bagi-perempuan> (diakses 03 September 2018).
- Miles, M.B. & A.M. Huberman (1984) *Qualitative Data Analysis: A source book for new methods*. Beverly Hills CA: Sage Publication Inc
- Pardede, Erlina Pardede, *Buku Kecil Tentang HIV/AIDS, KDRT, Perkosaan, Pernikahan Dini dan trafficking*, (Pematangsiantar: KN LWF, 2017).
- Pusat Kajian Perlindungan Anak, *Perempuan NIAS Merajut Mimpi*, (Medan: PKPA, 2008).
- Pusat Kajian Perlindungan Anak, *Perempuan Nias Merajut Mimpi*, (Medan: PKPA, 2008).

- Safitri, Eva 'MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak', dalam, [ttps://news.detik.com/berita/4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak](https://news.detik.com/berita/4342214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak) (diakses, 15 Desember 2018)
- Sunnah Syata, Lillah, "Keadaan Sosial Budaya Masyarakat tentang Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi", dalam <http://lillahsunnahsyata.blogspot.co.id/2013/05/keadaan-sosial-budaya-masyarakat.html> (diakses 03 September 2018).
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
- Wenda, Yuwenus, *Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012).
- Williams, David C. (1988). *Naturalistic Inquiry Materials*. Bandung: FPS IKIP, sebagaimana disebutkan dalam Faisal, Sanafiah (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: YA3.